

ANALISIS PENGARUH GINI RATIO DAN PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI PEMERINTAH (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

William Barker Hutabarat¹

Joko Suharinto²

Universitas Negeri Medan

Alamat: JL. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara (20221).

Korespondensi Penulis: williamhutabarat02@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine how the Gini Ratio and regional revenues affect the level of government consumption based on current prices in North Sumatra Province. Government consumption is seen as an important element in the structure of state expenditure, because it reflects the active role of the government in providing public services and supporting economic development. The Gini Ratio is used as an indicator to measure the level of inequality in the distribution of community income, while regional revenues indicate the government's fiscal capacity to finance expenditures. This study uses secondary data and is analyzed using a quantitative approach to see how much each variable contributes to government consumption. The results of the analysis show that regional revenues have a positive and significant effect on government consumption. On the other hand, the Gini Ratio does not show a significant effect, although it is still important to consider in efforts to realize equitable development. These findings can be a reference for regional governments in formulating more targeted, fair, and sustainable fiscal policies.*

Keywords: *Government Consumption Based On Current Prices, Gini Ratio, Revenue/Income.*

ANALISIS PENGARUH GINI RATIO DAN PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI PEMERINTAH (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh Gini Ratio dan penerimaan pendapatan daerah terhadap tingkat konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera Utara. Konsumsi pemerintah dipandang sebagai elemen penting dalam struktur pengeluaran negara, karena mencerminkan peran aktif pemerintah dalam menyediakan layanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi. Gini Ratio dipakai sebagai indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, sementara penerimaan daerah menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pengeluaran. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan dianalisis melalui pendekatan kuantitatif guna melihat seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap konsumsi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi pemerintah. Sebaliknya, Gini Ratio tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, meskipun tetap penting untuk dipertimbangkan dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku, Gini Rasio, Penerimaan/Pendapatan.

LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola perekonomian melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan melakukan konsumsi pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Namun, konsumsi pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio, serta tingkat pendapatan atau penerimaan yang diperoleh oleh daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, ketimpangan pendapatan masih menjadi isu penting yang dapat berdampak terhadap kemampuan dan arah belanja pemerintah, terutama dalam konteks harga berlaku yang menggambarkan kondisi ekonomi riil saat ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara Gini Ratio, pendapatan, dan konsumsi pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan daerah cenderung berpengaruh positif terhadap konsumsi pemerintah, karena semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula belanja yang dapat dilakukan. Sementara itu,

pengaruh Gini Ratio masih menunjukkan hasil yang beragam: ada yang menyebutkan tidak signifikan, ada pula yang menemukan pengaruh negatif. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan ketiga variabel ini dengan fokus di Sumatera Utara masih terbatas, terutama dalam konteks harga berlaku.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus wilayah yang spesifik di Provinsi Sumatera Utara serta penggunaan pendekatan harga berlaku (ADHB) yang lebih mencerminkan kondisi riil perekonomian saat ini. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggabungkan analisis Gini Ratio dan pendapatan secara bersamaan terhadap konsumsi pemerintah, sehingga penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh Gini Ratio dan pendapatan terhadap konsumsi pemerintah (ADHB) di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel tersebut serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan merata.

KAJIAN TEORITIS

Pengaruh Gini Rasio Terhadap Konsumsi Pemerintah (ADHB)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan gini rasio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap konsumsi pemerintah (ADHB) di Kab/Prov. Sumatera Utara. Artinya hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini mendukung teori sebelumnya, Menurut Barro (2000), ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak selalu mendorong peningkatan konsumsi pemerintah secara signifikan karena pemerintah mungkin menghadapi keterbatasan fiskal atau kebijakan redistributif yang belum efektif, sehingga pengaruh ketimpangan terhadap pengeluaran publik menjadi kurang jelas atau bahkan negatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Prasetyo dan Putri 2018), di Sumatera Utara pengaruh gini ratio terhadap konsumsi pemerintah justru negatif dan tidak signifikan. Artinya, meski ketimpangan naik, konsumsi pemerintah tidak meningkat secara nyata. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah, prioritas belanja yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur (belanja modal), serta kebijakan konsumsi yang belum tepat sasaran. Selain itu, faktor lain seperti

ANALISIS PENGARUH GINI RATIO DAN PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI PEMERINTAH (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

kebijakan fiskal pusat juga berperan lebih besar. Jadi, ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak otomatis membuat konsumsi pemerintah naik di Sumatera Utara, karena keterbatasan dana dan fokus belanja yang berbeda

Pengaruh Penerimaan/Pendapatan Terhadap Konsumsi Pemerintah (ADHB)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan gini rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi pemerintah (ADHB) di Kab/Prov. Sumatera Utara. Artinya hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini mendukung teori sebelumnya, menurut Arifin, S. (2017) menyatakan bahwa pendapatan daerah berperan penting dalam menentukan kapasitas fiskal daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya belanja pemerintah. Hubungan ini bersifat positif karena peningkatan pendapatan akan memperbesar ruang fiskal pemerintah untuk melakukan pengeluaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Simanjuntak dan Harahap 2020) bahwa semakin besar pendapatan daerah, maka semakin besar pula pengeluaran atau konsumsi pemerintah daerah. Artinya, jika pemerintah daerah punya lebih banyak pemasukan baik dari pajak, dana pusat, atau sumber lain mereka bisa lebih leluasa membiayai kebutuhan seperti pembangunan, gaji pegawai, dan pelayanan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah, serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih fokus meningkatkan pendapatan, karena hal itu sangat memengaruhi kemampuan mereka dalam melayani masyarakat. Dengan kata lain, pendapatan yang kuat akan memperkuat kemampuan belanja pemerintah, dan ini penting bagi kemajuan daerah.

Pengaruh Gini Ratio dan Penerimaan/Pendapatan Terhadap Konsumsi Pemerintah (ADHB)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan gini ratio dan penerimaan/pendapatan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi pemerintah (ADHB) di kab/kota provinsi Sumatera Utara. Artinya hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Selanjutnya diperoleh nilai $r - \text{squared}$ sebesar 0,9648 berarti sekitar 96,48% variasi dalam variabel konsumsi pemerintah (ADHB) dapat di jelaskan oleh

variabel independen tersebut, sementara sisanya 3,52% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data diperoleh dari:

- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Dokumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Data yang diambil berupa:

- Konsumsi pemerintah per tahun (dalam satuan rupiah)
- Pendapatan atau penerimaan daerah per tahun
- Nilai Gini Ratio per tahun sebagai indikator ketimpangan pendapatan

Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan dokumen resmi atau data statistik dari situs BPS atau instansi terkait.
- Literatur studi, dengan membaca jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menggambarkan pola data dalam bentuk grafik dan tabel, kemudian memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai:

- Bagaimana konsumsi pemerintah berubah dari tahun ke tahun
- Bagaimana pendapatan daerah berkembang
- Bagaimana perubahan Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan

ANALISIS PENGARUH GINI RATIO DAN PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI PEMERINTAH (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Hubungan antar variabel juga dianalisis secara visual dengan melihat tren dan perbandingan grafik, sehingga dapat disimpulkan apakah peningkatan belanja dan pendapatan pemerintah berdampak terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Pendekatan Interpretatif

Selain data numerik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif dengan menganalogikan kebijakan fiskal layaknya pengelolaan keuangan rumah tangga, untuk memudahkan pembaca memahami hubungan antara kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Uji Hipotesis

H1: Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Gini Rasio terhadap Konsumsi Pemerintah (Atas Dasar Harga Berlaku).

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerimaan/Pendapatan terhadap Konsumsi Pemerintah (Atas Dasar Harga Berlaku).

H3: Terdapat pengaruh signifikan Gini Rasio dan Penerimaan/Pendapatan terhadap Konsumsi Pemerintah (Atas Dasar Harga Berlaku).

Hasil Penelitian

1. Uji Hipotesis

Statistik pengujian dalam penelitian dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu uji parsial (uji t-statistik), uji f-statistik dan uji koefisien determinasi.

Tabel 1. Uji Hipotesis

Dependent Variable: KP
Method: Least Squares
Date: 05/28/25 Time: 12:53
Sample: 2010 2024
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44027.59	32750.25	1.344344	0.2037
GR	-88220.03	89170.88	-0.989337	0.3420
PDP	3.126748	0.419516	7.453229	0.0000

R-squared	0.964818	Mean dependent var	47668.18
Adjusted R-squared	0.958955	S.D. dependent var	12112.73
S.E. of regression	2453.989	Akaike info criterion	18.62567
Sum squared resid	72264739	Schwarz criterion	18.76728
Log likelihood	-136.6926	Hannan-Quinn criter.	18.62417
F-statistic	164.5441	Durbin-Watson stat	1.508668
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Gini Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Konsumsi Pemerintah (Atas Dasar Harga berlaku) di Kab/Kota Prov. Sumatera utara dengan perolehan t hitung $(-0,98) < t$ tabel $(1,78)$ dengan prob. $0,342 > 0,5$, maka H_0 diterima
2. Penerimaan/Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Konsumsi Pemerintah (Atas Dasar Harga berlaku) di Kab/Kota Prov. Sumatera utara dengan perolehan t hitung $(7,45) > t$ tabel $(1,78)$ dengan prob. $0,000 < 0,5$, maka H_0 di tolak
3. Secara simultan Gini rasio, Penerimaan/Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi Pemerintah (Atas Dasar Harga berlaku) di Kab/Kota Prov. Sumatera utara dengan perolehan hitung F hitung $(164,54) > F$ tabel $(3,88)$ dengan prob, $0,000 < 0,05$ maka H_0 di tolak.
4. Nilai R-squared sebesar 0,964818 berarti sekitar 96,48% variasi dalam variabel Konsumsi Pemerintah (Atas Dasar Harga berlaku) dapat di jelaskan oleh variabel independen tersebut, sementara sisanya 3,52% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pembangunan, pemerintah punya peran yang sangat penting sebagai penggerak ekonomi, salah satunya lewat pengeluaran pemerintah. Pengeluaran ini mencakup berbagai hal, mulai dari layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga membayar gaji pegawai negeri. Besarnya pengeluaran atau konsumsi pemerintah ini tidak lepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, seperti tingkat kesenjangan pendapatan dan seberapa besar pendapatan yang diterima oleh daerah.

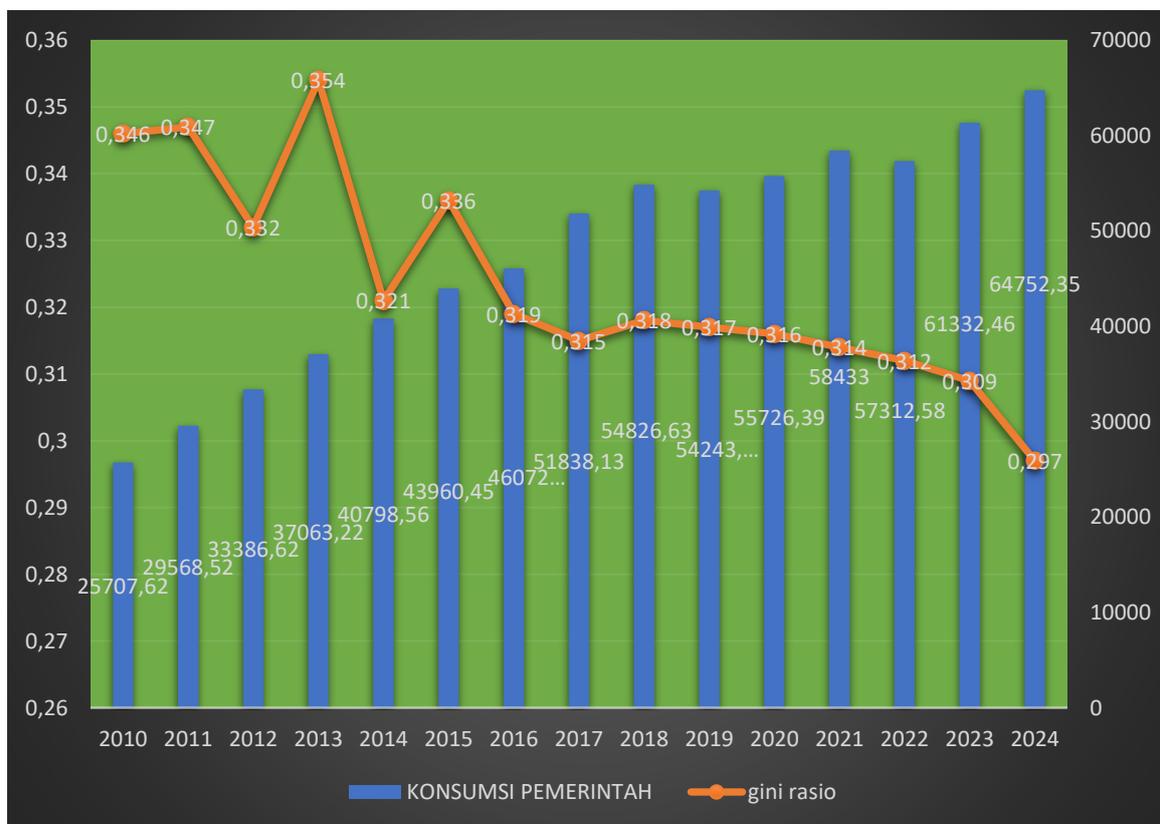
Gini Ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka Gini Ratio, berarti semakin besar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan ini bisa berdampak pada keputusan pemerintah dalam membelanjakan anggaran, karena makin tinggi kesenjangan, makin besar pula kebutuhan intervensi sosial dari pemerintah.

Di sisi lain, kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan juga sangat tergantung pada pendapatan daerah. Semakin besar

ANALISIS PENGARUH GINI RATIO DAN PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI PEMERINTAH (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

penerimaan daerah, semakin leluasa pula pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan, termasuk konsumsi pemerintah itu sendiri.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dan pendapatan daerah benar-benar berpengaruh terhadap konsumsi pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Harapannya, hasil dari penelitian ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah daerah agar dapat merancang kebijakan keuangan yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat



Gambar 1.1 Perkembangan Konsumsi pemerintah dan Gini Rasio di Sumatera utara Tahun 2010-2024

Gini Ratio merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka mendekati 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang tinggi, sementara angka mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tajam. Menurut Todaro dan Smith (2015), ketimpangan yang terlalu besar dapat memperlambat proses

pembangunan dan memperbesar potensi konflik sosial. Oleh karena itu, memahami perkembangan Gini Ratio sangat penting dalam melihat dampak dari kebijakan pemerintah.

Jika dilihat berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) dari tren tahunan, konsumsi pemerintah di Provinsi Sumatera Utara secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, Gini Ratio tidak selalu mengikuti arah yang sama, dan justru menunjukkan perkembangan yang menarik.

Pada periode 2010–2013, konsumsi pemerintah naik secara perlahan, sementara Gini Ratio justru berfluktuasi. Misalnya, Gini Ratio naik dari 0,346 di tahun 2010 ke 0,347 pada 2011, namun kemudian turun ke 0,332 pada 2013. Ini bisa menjadi indikasi bahwa kenaikan belanja pemerintah saat itu mulai menyentuh masyarakat bawah, sehingga ketimpangan bisa ditekan meskipun pengeluaran bertambah.

Tahun 2014 menjadi titik kritis, ketika Gini Ratio melonjak ke angka tertinggi yaitu 0,354, padahal belanja pemerintah juga meningkat. Hal ini bisa menunjukkan bahwa alokasi belanja saat itu belum tepat sasaran atau belum cukup menjangkau kelompok masyarakat miskin. Sejalan dengan itu, menurut Stiglitz (2012), ketimpangan sering kali tetap terjadi jika belanja negara lebih banyak menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi daripada mendukung layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya, pada periode 2015–2017, terlihat tren positif di mana Gini Ratio terus menurun hingga mencapai 0,319 pada 2017, sementara konsumsi pemerintah tetap tumbuh. Ini bisa diartikan bahwa belanja pemerintah mulai diarahkan lebih efektif dan mampu menurunkan kesenjangan sosial. Seperti yang disampaikan oleh Musgrave (1989), pengeluaran pemerintah yang dikelola secara adil dan efisien dapat menjadi instrumen penting dalam redistribusi pendapatan.

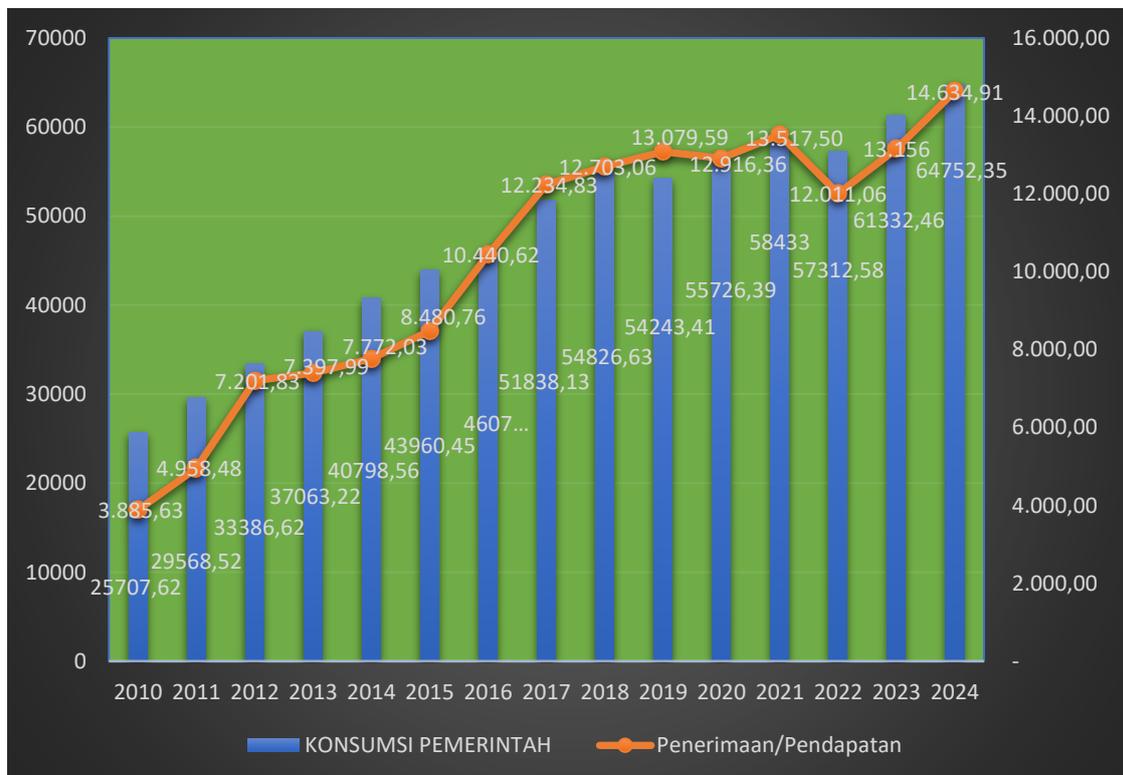
Pada rentang 2018 hingga 2022, Gini Ratio berada dalam posisi relatif stabil, berkisar antara 0,317 hingga 0,313, sedangkan konsumsi pemerintah terus mengalami kenaikan. Artinya, meski ketimpangan belum banyak berubah, kondisi tidak memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah sudah mulai konsisten dalam menjaga keseimbangan sosial.

Puncaknya terjadi pada 2023–2024, ketika konsumsi pemerintah naik secara signifikan, sementara Gini Ratio justru menurun drastis hingga mencapai angka 0,297 angka terendah dalam satu dekade terakhir. Tren ini memperkuat dugaan bahwa

ANALISIS PENGARUH GINI RATIO DAN PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI PEMERINTAH (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

kebijakan pengeluaran pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata dalam menekan kesenjangan pendapatan. Seperti dikatakan Joseph Stiglitz, “Pemerintah yang menjalankan kebijakan ekonomi inklusif dapat menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata.”

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa arah dan efektivitas belanja pemerintah sangat memengaruhi perubahan dalam ketimpangan sosial. Jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran, konsumsi pemerintah dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan bersama.



Gambar 1.2 Perkembangan Konsumsi Pemerintah dan Penerimaan/Pendapatan di Sumatera Utara Tahun 2010-2024

Grafik Gambar 1.2 memberikan gambaran visual tentang perkembangan antara konsumsi pemerintah dan pendapatan/penerimaan daerah di Provinsi Sumatera Utara selama rentang waktu 15 tahun (2010–2024). Dua indikator ini sangat penting dalam melihat bagaimana pemerintah mengelola keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta dalam merespons kondisi ekonomi yang berubah-ubah setiap tahunnya.

Menurut Musgrave (1989), fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi merupakan peran penting dari keuangan publik dalam pembangunan. Dengan kata lain, saat pendapatan naik, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk membiayai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun ketika pendapatan menurun, keputusan fiskal menjadi lebih krusial karena tetap harus menjaga keberlanjutan layanan publik.

Jika dilihat berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) dari tren tahunan : 2010–2012: Konsumsi pemerintah meningkat dari Rp25.707,62 ribu (2010) menjadi Rp33.386,62 ribu (2012). Pendapatan juga meningkat dari Rp8.868 juta ke Rp12.548 juta. Kenaikan ini menandakan awal pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup positif. Pemerintah mulai aktif membelanjakan anggaran untuk kebutuhan publik, seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal.

Pada 2013–2015, konsumsi naik dari Rp37.063 ke Rp43.960 ribu, sementara pendapatan meningkat dari Rp12.799 ke Rp10.842 juta (dengan sedikit fluktuasi). Ini menunjukkan meskipun pendapatan sempat turun, konsumsi tetap naik secara wajar. Sejalan dengan pendapat Richard A. Musgrave, belanja pemerintah tetap dijaga demi fungsi stabilisasi, agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak terganggu oleh dinamika pendapatan tahunan.

2016–2018: Pendapatan Melonjak, Konsumsi Terkendali Pendapatan naik tajam dari Rp12.234 juta ke Rp13.079 juta. Konsumsi pemerintah juga naik tapi tidak setajam pendapatan, dari Rp46.072 ke Rp54.243 ribu. Kondisi ini menandakan efisiensi fiskal. Pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan namun tetap menjaga belanja agar tidak berlebihan. Ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang lebih bijak.

Tahun 2019-2021 menjadi masa penuh tantangan. Pendapatan sempat mencapai Rp13.517 juta pada 2020, lalu turun ke Rp12.011 juta di 2021. Namun konsumsi tetap tinggi: Rp55.726 → Rp57.312 ribu. Penurunan pendapatan ini bisa dikaitkan dengan efek pandemi COVID-19, yang melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Tetapi pemerintah tetap menjaga konsumsi agar masyarakat tetap mendapat pelayanan dasar. Hal ini membuktikan bahwa belanja sosial bersifat prioritas dalam situasi krisis, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Stiglitz (2000) bahwa fungsi pemerintah sangat vital dalam memberikan jaring pengaman sosial ketika pasar gagal.

2022–2024: Pendapatan meningkat dari Rp13.156 juta (2022) menjadi Rp14.694 juta (2024). Konsumsi pemerintah juga meningkat stabil dari Rp61.332 ke Rp64.752 ribu.

ANALISIS PENGARUH GINI RATIO DAN PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI PEMERINTAH (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Kondisi ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta kembalinya aktivitas pembangunan yang didukung oleh fiskal yang sehat. Pemerintah kembali memiliki ruang untuk mengoptimalkan belanja publik tanpa tekanan besar dari sisi pendapatan.

Dari tahun 2010 hingga 2024, terlihat bahwa pengeluaran dan pendapatan pemerintah Sumatera Utara berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Awalnya, meski belanja pemerintah meningkat, Gini Ratio sempat naik. Namun setelah 2015, arah kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, dan ketimpangan mulai menurun. Hal ini membuktikan bahwa ketika anggaran dikelola dengan baik, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Joseph Stiglitz (2000), “Kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial.” Pada akhirnya, data ini tidak hanya soal angka, tetapi mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa gini ratio dan penerimaan/pendapatan baik secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi pemerintah (ADHB) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Dengan kontribusi sebesar 96,48% variasi dalam konsumsi pemerintah (ADHB) dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya 3,52% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terarah dan terpadu untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan (gini ratio). Upaya tersebut penting agar konsumsi pemerintah dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik secara adil dan merata.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, S. (2017). *Keuangan Daerah dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). *Statistik Indonesia 2010–2024*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth*, 5(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1009850119329>

- Musgrave, R. A. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Book Company.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (n.d.). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen APBD 2010–2024*.
- Prasetyo, W., & Putri, N. (2018). Pengaruh Gini Rasio Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 18(2), 112–121.
- Simanjuntak, H., & Harahap, S. (2020). Pendapatan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Pemerintah di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(1), 45–59.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector* (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.